

**PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN  
USAHA DAN KEBIJAKAN  
PERSAINGAN DIKAITKAN DENGAN  
KINERJA KOMISI PENGAWAS  
PERSAINGAN USAHA ( KPPU )**



**Prof Dr Jamal Wiwoho,SH MHum**

# Tujuan Pembentukan Undang-undang No. 5/1999

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

# Penegakan Hukum

- Monitoring Pelaku Usaha
- Penanganan Pelaporan
- Penanganan Perkara
- Litigasi dan Monitoring Pelaksanaan Putusan



# Visi KPPU

“ Terciptanya iklim usaha yang sehat, kesempatan berusaha yang sama, serta terciptanya ekonomi yang efisien dan adil, menuju masyarakat yang adil dan sejahtera”



# Misi KPPU

- Mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999;
- Mendorong internalisasi nilai persaingan usaha pada pelaku usaha;
- Mendorong internalisasi nilai persaingan dalam kebijakan pemerintah.

# Strategi dan Program KPPU

- I. Pengembangan Kelembagaan
- II. Penegakan Hukum
- III. Pengembangan Kebijakan Persaingan Usaha
- IV. Dukungan publik (*multistakeholder*)



# Pengembangan Kelembagaan

1. Pengembangan Kelembagaan Sekretariat Komisi
2. Pengembangan Kantor Perwakilan KPPU di daerah
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPPU
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana KPPU
5. Anggaran KPPU
6. Seleksi Anggota KPPU

# Monitoring Pelaku Usaha

## (Januari 2001 – Desember 2006)

Monitoring Pelaku Usaha	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total
Dihentikan	5	3	5	7	4	2	26
Dilanjutkan Ke Pemeriksaan Pendahuluan	1	1	4	0	4	2	12
Dilanjutkan Menjadi Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah	2	0	1	0	3	1	7
Dilanjutkan Menjadi Monitoring Struktural	0	0	0	1	3	1	5
Masih Berjalan	0	0	0	0	0	6	6
Jumlah Monitoring	8	4	10	8	14	12	56



# Public Hearing

(Januari 2001 – Desember 2006)

Tahun	Jumlah Public Hearing	Keterangan
2001	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Price Fixing Taxi &amp; Organda</li> <li>- Price Fixing Tarif Pesawat Terbang</li> <li>- Divestasi BCA</li> <li>- YPF Maxus di Bidang Perminyakan</li> </ul>
2002	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telkomnet</li> <li>- Semen</li> <li>- Haji</li> <li>- Tata Niaga Gula</li> </ul>
2003	1	- Monopoli Perum Peruri
2004	1	-Sistem Niaga Garam Madura
2005	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Telkomnet Instant di Surabaya</li> <li>-Tender Infrastruktur KTI</li> <li>-Minyak Tanah</li> <li>-Garam</li> </ul>
2006	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Retail</li> <li>-Distribusi Gula</li> <li>-Pupuk</li> </ul>
<b>Total</b>	<b>16</b>	

# Penanganan Pelaporan

## (Juni 2000 – Desember 2006)

No.	Klasifikasi Laporan	Jumlah Laporan
1	Oligopoli (Pasal 4)	2
2	Penetapan harga (Pasal 5)	11
3	Diskriminasi harga (Pasal 6)	1
4	Kartel (Pasal 11)	9
5	Integrasi vertikal (Pasal 14)	7
6	Perjanjian tertutup (Pasal 15)	4
7	Monopoli (Pasal 17)	19
8	Penguasaan Pasar (Pasal 19)	19
9	Praktek jual rugi (Pasal 20)	9
10	Persekongkolan tender (Pasal 22)	252
11	Penyalahgunaan posisi Dominan (Pasal 25)	10
12	Jabatan rangkap (Pasal 26)	2
13	Laporan yang berkaitan dengan kebijakan anti persaingan yang dikeluarkan oleh Pemerintah	23
14	Laporanyang tidak berkaitan dengan yurisdiksi KPPU	53
15	Tembusan	129
16	Bukan laporan	13
<b>Total</b>		<b>563</b>

# Penanganan Perkara KPPU

(Juni 2000 – Desember 2006)

TAHUN	PENETAPAN	PUTUSAN	PERKARA BERJALAN	TOTAL
2000	0	2	0	2
2001	1	4	0	5
2002	4	4	0	8
2003	2	7	0	9
2004	2	7	0	9
2005	4	18	0	22
2006	5	4	9	18
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>46</b>	<b>9</b>	<b>73</b>

**REKAPITULASI PERKARA PERSAINGAN USAHA  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
JUNI 2000 S/D DESEMBER 2006**

		PERKARA LAPORAN							PERKARA INISIATIF							TOTAL P E R K A R A
TAHUN		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
PENETAPAN	TIDAK ADA INDIKASI	0	1	4	2	1	4	1	0	0	0	0	1	0	0	14
	PERUBAHAN PERILAKU	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	4
PUTUSAN	BERSALAH	1	0	1	2	6	10	4	0	1	1	4	1	3	0	34
	TIDAK BERSALAH	0	2	0	1	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	9
	SARAN DAN PERTIMBANGAN	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3
PERKARA BERJALAN		0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9
TOTAL		1	4	5	5	7	19	15	1	1	3	4	2	3	3	73
		56							17							

# Rekapitulasi Perkara berdasarkan dugaan pelanggaran pasal

PERJANJIAN YANG DILARANG		KEGIATAN YANG DILARANG		PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN	
PASAL 4	3	PASAL 17	10	PASAL 25	18
PASAL 5	10	PASAL 18	1	PASAL 26	4
PASAL 6	1	PASAL 19	29	PASAL 27	1
PASAL 7	0	PASAL 20	1	PASAL 28	0
PASAL 8	0	PASAL 21	0	PASAL 29	0
PASAL 9	2	PASAL 22	36		
PASAL 10	1	PASAL 23	0		
PASAL 11	6	PASAL 24	3		
PASAL 12	1				
PASAL 13	1				
PASAL 14	3				
PASAL 15	11				

# Litigasi

(Juni 2000 – Desember 2006)

KEBERATAN DI PENGADILAN NEGERI		PUTUSAN	SEDANG BERJALAN	DICABUT	TOTAL
	MENANG	4	4	1	20
	KALAH	11			
	TOTAL	15	4	1	

KASASI DI MAHKAMAH AGUNG		PUTUSAN	SEDANG BERJALAN	TOTAL
	MENANG	4	10	15
	KALAH	0		
	SERI	1		
	TOTAL	5	10	

# Pengembangan Kebijakan Persaingan Usaha

1. Harmonisasi Kebijakan
2. Kajian Sektor Industri dan Perdagangan
3. Penyusunan Naskah Akademis dan Rencana Revisi UU No.5/1999
4. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan UU No.5/1999

# Saran dan Pertimbangan

Tahun	Jumlah	Instansi Pemerintah
2001	4	-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral -Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi
2002	2	-Menteri Agama -Ketua DPD Organisasi Angkutan darat (ORGANDA) DKI Jakarta
2003	10	<b>Menteri Pendayagunaan BUMN ;</b> Menteri Keuangan; Menteri Perhubungan Walikota Makassar; Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; Menteri Perindustrian dan Perdagangan; Bupati Kabupaten Sukabumi; Menteri Pertanian; Presiden Republik Indonesia
2004	3	-Menteri Perindustrian dan Perdagangan -Presiden Republik Indonesia -Kepala BOTASUPAL
2005	12	<b>Bupati Kabupaten Garut;</b> Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia; Kepala BKPM; Menteri Keuangan; Menteri ESDM; Menteri Dalam Negeri; Pemda Tingkat I Sumatera Utara; Pimpinan DPRD Tk. I Sumatera Utara, Menteri Pertanian
2006	5	<b>Menteri Keuangan;</b> Menteri Dalam Negeri; Gubernur Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara ; Walikota Bekasi; Gubernur Bank Indonesia



# Dukungan Publik (*multistakeholders*)

1. Sosialisasi
2. Forum Jurnalis
3. Temu Usaha
4. Komunitas Persaingan Usaha
5. Workshop Hakim
6. Publikasi
7. Kerjasama Kelembagaan

# Tantangan

- Independensi KPPU
- Dukungan Parlemen
- Kewenangan sebagai Lembaga Pemutus Perkara
- Kewenangan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah
- Liberalisasi perdagangan
- Globalisasi hukum persaingan
- Demokratisasi dan transparansi
- Dukungan lembaga internasional
- Dukungan kalangan pers
- Luasnya wilayah geografis dan banyaknya pelaku usaha

# Hambatan

- Kedudukan KPPU dalam struktur ketatanegaraan
- Sistem anggaran pembiayaan KPPU
- Kemampuan sumber daya manusia
- Keterbatasan instrumen penegakan hukum persaingan usaha
- Belum tersedianya konsep komunikasi
- Timbulnya hambatan lokal dari Pemerintah Daerah
- Sentimen Nasionalisme
- Sistem Hukum yang kurang mendukung
- Rendahnya budaya persaingan
- Masih kentalnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
- Belum terinternalisasinya nilai-nilai persaingan dalam kebijakan pemerintah

# TERIMA KASIH

